

PKN Selasa, 9 November 2021

Dinamika Historis, dan Urgensi Wawasan Nusantara Sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan Indonesia dalam Konteks Pergaulan Dunia

- Dr. Rahmat Hidayat, SH., S.Sos., M.Si.

Menelusuri Konsep dan Urgensi Wawasan Nusantara

Pengertian wawasan Nusantara

Etimologis

Terminologis

- Etimologis: wawasan nusantara berasal dari dua kata wawasan dan nusantara. Wawasan dari kata wawa (bahasa Jawa) yang artinya pandangan. Sementara kata "nusantara" merupakan gabungan kata nusa yang artinya pulau dan antara.
 - Kata "nusa" dalam bahasa sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa latin, kata "nusa" berasal dari kata nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa.
 - Kata kedua yaitu "antara" memiliki padanan dalam bahasa latin, in dan terra yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. "Antara" juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antar (antara) dan relasi. Sedangkan dalam bahasa sanskerta, kata "antara" dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar.
 - Penggabungan kata "nusa" dan "antara" menjadi kata "nusantara"

dapat diartikan sebagai kepulauan yang diantara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut.

• Terminologis

- adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah tersebut dikemukakan. Pengertian terminologis umumnya adalah pengertian istilah menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut. Pada uraian sebelumnya, Anda telah mengkaji konsep wawasan nusantara secara etimologis.
- Berdasar pengertian terminologis, wawasan nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri.

Pengertian Wawasan Nusantara Menurut Tokoh / Lembaga:

1. Hasan Habib

↳ Kebulatan wilayah nasional, termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi dan satu kesatuan ajaran Islam.

2. Wan Usman

↳ Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.

3. MPR Tahun 1998

↳ Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan



Lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

a Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 1999

b Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan memiliki strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

- Membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air, meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dengan lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan, sebagai satu wilayah.

Harcat atau Esensi Wawasan Nusantara

Ld adalah "persatuan bangsa dan kesatuan wilayah".

Pernyataan rumusan wawasan nusantara dalam GBHN 1998 berikut:

"Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".

Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang

Wawasan Nusantara

• Latar belakang historis wawasan nusantara

- Lahirnya konsepsi wawasan nusantara bermula dari Perdana Menteri Ir. H. Djawanda Kartawidjaja yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Djawanda.

• Isi deklarasi tersebut sebagai berikut.

- "Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari pada wilayah dataran Negara Indonesia dan dengan demikian bagian dari pada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia. lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas landas laut territorial yang lebarnya (2 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang tetapi berluar pada pulau-pulau Negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur seleks-lekasnya dengan Undang-Undang."



- Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut territorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau-pulau terluar Indonesia. Dengan garis territorial yang baru ini wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah laut di antara pulau-pulau bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau.
- Sebelum keluarnya Deklarasi Pjuanda, wilayah Indonesia didasarkan pada Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TzMKO 1939) atau dikenal dengan nama Ordonansi 1939, sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Isi Ordonansi tersebut pada intinya adalah penentuan lebar laut 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau contour pulau/darat.
- Dengan peraturan zaman Hindia Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekiturnya dan sejauh 3 mil dari garis pangkal.
- Laut setelah garis 3 mil merupakan lautan bebas yang berarti kapal asing boleh dengan bebas melayani laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Laut dengan demikian menjadi pemisah pulau-pulau di Indonesia.

Kopiso



- Konsepsi wawasan nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara yakni dimasukkannya ke dalam pasal 25 A UUD NRI 1945, yang menyatakan "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang", Menurut pasal tersebut, negara Indonesia dianggap berdasar wilayahnya.
- Setelah keluarnya Deklarasi Djawanda (1957) dibentuklah Undang-undang No. 4 Ppr Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.
- Memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara berdasar Deklarasi Djawanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Melalui perjuangan panjang, akhirnya konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menemui dokumen yang bernama "The United Nations Convention on the law of the Sea" (UNCLOS).

Latar Belakang Politik Wawasan Nusantara

- Secara politis ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dimebangkan, difestifkan, dan dipertahankan secara terus menerus.
- Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea II adalah untuk mewujudkan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat,



adil, dan marmur.

- Tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut diakui aksa Negara Kepulauan (Archipelago State)
- UNCLOS 1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang No. 17 tahun 1985. Berdasar konvensi hukum laut tersebut, wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas, yakni mencapai 5,9 juta km², terdiri atas 3,2 juta km² perairan territorial dan 2,7 juta km² perairan zona ekonomi eksklusif (EEZ). Luas perairan ini belum termasuk landas kontinen (continent shelf).

Latar Belakang SosioLogis Wawasan Nusantara

- Berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan nusantara yang pada awalnya berpandangan akan "kesatuan atau keutuhan wilayah" diperluas (cigi sebagai pandangan akan "persatuan bangsa". Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus menerus.
- Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui penitiwa kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, ditegaskan dalam sumpah pemuda 28 Oktober 1928, dan berhasil diwujudkan dengan Proklamasi Kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum Deklarasi Djakarta 1957, konsep



Semangat dan kesatuan, kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk satu bangsa merdeka.

- Semangat bersatu itu pada awalnya adalah bersatu dalam berjuang membebaskan diri dari penjajahan, dan selanjutnya bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia.

- Ketika bangsa Indonesia merdeka tahun 1945 dengan dilandasi semangat kebangsaan dan rasa persatuan sebagai satu bangsa, ternyata wilayahnya belum merupakan satu kesatuan. Wilayah negara Indonesia merdeka di tahun 1945 masih menggunakan peraturan lama yakni Ordonansi 1939, di mana lebar laut teritorial Indonesia adalah 3 mil tiap pulau. Akibatnya, wilayah Indonesia masih terpecah dan dipisahkan oleh lautan bebas.
- perlu diupayakan bagaimana agar terjadi satu kesatuan wilayah guna mendukung semangat kebangsaan ini. Salah satunya dengan konsep wawasan nusantara yang diawali dengan keluarnya Deklarasi Djuanda 1957.
- Dengan demikian Wawasan Nusantara tidak hanya wawasan kewilayahan tetapi juga berkembang sebagai wawasan kebangsaan. Esensi wawasan nusantara tidak hanya kesatuan atau keutuhan wilayah tetapi juga persatuan bangsa.

Latar Belakang Politis Wawasan Nusantara

- secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus menerus.
- Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea II adalah untuk mewujudkan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan Makmur.
- Tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

- Visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR No VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.
- Rumusan wawasan nusantara dimasukkan dalam naskah Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Setelah GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi diberi kewenangan menetapkan GBHN, konsepsi wawasan nusantara dimasukkan pada rumusan Pasal 25 A UUD NRI 1945 hasil Perubahan Keempat tahun 2002.

Latar Belakang Politis Wawasan Nusantara

- secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus menerus.
- Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea II adalah untuk mewujudkan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan Makmur.
- Tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Wawasan nusantara pada dasarnya adalah pandangan Geopolitik Bangsa Indonesia

- Geopolitik berasal dari bahasa Yunani, dari kata geo dan politik. "Geo" berarti bumi dan "Politik" politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara) dan **teia** yang berarti urusan.
- dalam Bahasa Inggris, *politics* adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Tindakan, cara dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografi tempat masyarakat hidup. Selanjutnya geopolitik dipandang sebagai studi atau ilmu.
- Geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang "pengaruh faktor geografis pada tindakan politik". Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa.
- Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi dan politik suatu negara.

Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Wawasan Nusantara

- Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain:
 - a. *Bercirikan negara kepulauan (Archipelago State) dengan jumlah 17.508 pulau.*
 - b. *Luas wilayah 5.192 juta km² dengan perincian daratan seluas 2.027 juta km² dan laut seluas 3.166 juta km². Negara kita terdiri 2/3 lautan / perairan*
 - c. *Jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km*
 - d. *Terletak diantara dua benua dan dua samudra (posisi silang)*
 - e. *Terletak pada garis khatulistiwa*
 - f. *Berada pada iklim tropis dengan dua musim*
 - g. *Menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkum Pasifik*
 - h. *Berada pada 60 LU- 110 LS dan 950 BT - 1410 BT*
 - i. *Wilayah yang subur dan habitable (dapat dihuni)*
 - j. *Kaya akan flora, fauna, dan sumberdaya alam*

- Wawasan nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya wawasan nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu.
- Bangsa Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan yakni:
 1. Memiliki keragaman suku, yakni sekitar 1.128 suku bangsa (Data BPS, 2010)
 2. Memiliki jumlah penduduk besar, sekitar 242 juta (Bank Dunia, 2011)
 3. Memiliki keragaman ras dan Agama
 4. Memiliki keragaman kebudayaan, sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa

- Konsep Wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosialbudaya, ekonomi serta pertahanan dan keamanan. Atau dengan kata lain perwujudan wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosialbudaya, ekonomi dan pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia terutama dalam melaksanakan pembangunan.
- Perhatikan Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai (silahkan Cek di Bab 8 Pendidikan Kewarganegaraan : Hal 232 - 234) :
 1. *Satu Kesatuan Politik*
 2. *Satu Kesatuan Ekonomi*
 3. *Satu Kesatuan Sosial Budaya*
 4. *Satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan*